

Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina Selama Eskalasi 2025

Humanitarian Crisis In The Israel Palestine Conflict During The 2025 Escalation

Adhi Munajar, Echa Eriza

¹⁻⁵Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2025

Revised 10 November 2025

Accepted 15 November 2025

Available online 24 November 2025

Keywords

Palestine Israel Conflict, Humanitarian Crisis, Escalation

Keywords

Konflik Palestina Israel, Krisis Kemanusiaan, Eskalasi



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to identify the main factors contributing to the escalation of the conflict in 2025, examine its impact on the humanitarian conditions of civilians, and assess the extent to which the international community's response has been able to address the crisis. Additionally, this research seeks to provide an overview of changes in patterns of violence, forms of resistance, and indicators of human rights violations that emerged throughout 2025. Thus, this study is expected to contribute academically to the understanding of contemporary conflicts and to the formulation of humanitarian-based recommendations. The method used is qualitative with a library research approach, analyzing literature from international organizational reports, journal articles, recent news coverage, human rights documents, and academic studies related to the Palestine Israel conflict. The data were analyzed descriptively and interpretatively to capture the conflict dynamics, global actors' responses, and ongoing humanitarian conditions. This approach allows researchers to view the broader context without relying on field observations, which are difficult to conduct in active conflict zones. The results show that 2025 is marked by increased military attacks, limited access to humanitarian aid, and a growing number of internally displaced persons. Human rights violations have worsened, particularly among vulnerable groups such as children and women. The international

community still faces major challenges in providing meaningful intervention due to differing geopolitical interests. In conclusion, the Palestine Israel conflict in 2025 demonstrates the urgent need for humanitarian-based approaches to conflict resolution and a stronger role from international institutions to protect civilians and ensure fair humanitarian access.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi peningkatan eskalasi konflik pada tahun 2025, menelaah dampaknya terhadap kondisi kemanusiaan masyarakat sipil, serta memahami sejauh mana respon komunitas internasional mampu mengatasi krisis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai perubahan pola kekerasan, pola perlawanan, serta indikator pelanggaran hak asasi manusia yang muncul sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami konflik kontemporer dan merumuskan rekomendasi berbasis kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, melalui analisis literatur dari laporan lembaga internasional, artikel jurnal, berita terkini, dokumen HAM, serta kajian akademik terkait konflik Palestina Israel. Data dianalisis secara deskriptif interpretatif untuk menangkap dinamika konflik, respon aktor global, serta kondisi kemanusiaan yang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat gambaran besar tanpa terikat pada observasi lapangan yang sulit dilakukan di zona konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2025 ditandai oleh meningkatnya serangan militer, terbatasnya akses bantuan kemanusiaan, serta bertambahnya jumlah pengungsi internal. Pelanggaran hak asasi manusia semakin meluas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Komunitas internasional masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan intervensi berarti karena perbedaan kepentingan geopolitik. Kesimpulannya, konflik Palestina Israel pada 2025 memperlihatkan urgensi pendekatan berbasis kemanusiaan dalam penyelesaian konflik, serta perlunya peran lebih kuat dari lembaga internasional untuk melindungi warga sipil dan menjamin akses kemanusiaan yang adil.

*Corresponding Author

Email: adhi.munajar@uin-suska.ac.id, echaeriza744@gmail.com

PENDAHULUAN

Konflik Palestina Israel kembali mengalami eskalasi tajam pada tahun 2025 dengan dampak kemanusiaan yang semakin memprihatinkan. Laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs menunjukkan bahwa hingga awal 2025, total korban meninggal mencapai lebih dari 58.000 jiwa, sedangkan korban luka melampaui 139.000 orang, dengan mayoritas merupakan warga sipil (United Nations, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik tidak lagi sekadar persoalan militer, melainkan tragedi kemanusiaan berskala besar yang mengguncang perhatian global.

Eskalasi kekerasan ini memunculkan kekhawatiran serius karena proporsi korban sipil sangat tinggi. Sebuah studi epidemiologi yang dipublikasikan tahun 2025 mengungkap bahwa sekitar 83% korban tewas adalah non-kombatan, termasuk anak-anak dan perempuan, yang menunjukkan ketidakseimbangan dampak konflik terhadap populasi rentan (Hassan & Al-Rashid, 2025). Temuan ini diperkuat oleh riset independen yang menyatakan bahwa tingkat kematian akibat serangan justru berada 41% lebih tinggi daripada laporan resmi akibat keterbatasan akses evakuasi dan layanan kesehatan (Mahmoud et al., 2025).

Selain korban langsung, krisis juga diperparah oleh runtuhnya sistem kesehatan dan akses bantuan kemanusiaan. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% fasilitas kesehatan di Gaza berhenti beroperasi karena kerusakan infrastruktur dan minimnya suplai medis (World Health Organization, 2025). Kondisi ini menyebabkan peningkatan kematian tidak langsung, terutama dari kelompok rentan. Seperti dikemukakan Al-Khatib (2025), “keruntuhan layanan kesehatan di Gaza menandai tahap paling kritis dalam krisis kemanusiaan modern abad ini.”

Dampak sosial kemanusiaan juga tampak dari tingginya jumlah pengungsi internal. Badan PBB untuk Pengungsi melaporkan bahwa pada kuartal pertama 2025, lebih dari 1,7 juta penduduk terpaksa mengungsi dari wilayah permukiman mereka, angka tertinggi sejak konflik panjang ini berlangsung (UNHCR, 2025). Kondisi pengungsian yang padat, kekurangan air, dan sanitasi buruk memperbesar risiko penyakit infeksi serta krisis kelaparan. Fenomena ini diperkuat oleh temuan International Rescue Committee yang menyebutkan bahwa tingkat kerawanan pangan ekstrem meningkat hingga 65% di wilayah Gaza (IRC, 2025).

Melihat tingginya jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia, tampak jelas bahwa konflik tahun 2025 tidak lagi dapat dianalisis hanya dari perspektif geopolitik atau keamanan. Kebutuhan untuk menelaahnya melalui perspektif kemanusiaan menjadi sangat penting. Menurut Al-Faruqi (2025), “konflik Palestina Israel kini telah bertransformasi menjadi krisis moral global, bukan sekadar pertentangan politik dua pihak.” Pernyataan ini menegaskan urgensi penelitian dengan pendekatan yang berfokus pada keselamatan dan hak hidup warga sipil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perubahan pola kekerasan, pola perlawanan, serta indikator pelanggaran hak asasi manusia yang muncul sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami konflik kontemporer dan merumuskan rekomendasi berbasis kemanusiaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji dinamika konflik Palestina Israel 2025 dengan menekankan aspek kemanusiaan. Penelitian akan mengidentifikasi faktor pendorong eskalasi, menganalisis dampak kemanusiaan terhadap populasi sipil, dan mengevaluasi respons komunitas internasional. Pendekatan kualitatif berbasis library research dipilih untuk menyusun analisis komprehensif berdasarkan laporan resmi, kajian akademik, dan data statistik terkini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami dinamika konflik Palestina Israel tahun 2025 dari perspektif kemanusiaan secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, hubungan, serta konteks sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya eskalasi konflik. Menurut Creswell (2021), penelitian kualitatif berfungsi untuk “menangkap pengalaman manusia dalam konteks yang kompleks melalui analisis interpretatif terhadap data yang bersifat naratif atau deskriptif”. Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk mengkaji fenomena konflik yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi harus dipahami melalui interpretasi terhadap data yang beragam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai dasar analisis. Peneliti mengumpulkan data dari laporan lembaga internasional, artikel jurnal ilmiah, publikasi HAM, arsip berita kredibel, serta buku-buku akademik terkait konflik Palestina Israel. Menurut Zed (2020), penelitian kepustakaan adalah “serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai referensi valid untuk menghasilkan analisis sistematis”. Dengan metode ini, peneliti dapat menyusun gambaran kronologis dan analitis mengenai perkembangan konflik selama tahun 2025.

Data dikumpulkan melalui proses seleksi dokumen berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan tahun publikasi terbaru, terutama sumber terbitan 2020–2025 agar hasil analisis tetap aktual. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretative analysis, yaitu menelaah tema, pola, dan indikator kemanusiaan yang muncul dalam literatur. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi adalah metode yang digunakan untuk “menggali makna simbolik dalam teks dengan cara sistematis dan terukur”. Teknik ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi pola eskalasi konflik, bentuk pelanggaran HAM, dan respon internasional secara komprehensif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber literatur, seperti laporan PBB, jurnal akademik, riset NGO internasional, dan buku ilmiah. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Patton (2020) yang menyatakan bahwa “triangulasi meningkatkan kekuatan temuan karena informasi diuji melalui berbagai perspektif yang berbeda”. Dengan demikian, hasil penelitian diperoleh melalui proses penguatan data yang konsisten, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi konflik Palestina Israel pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dalam aspek kemanusiaan. Data dari laporan lembaga kemanusiaan internasional yang diolah melalui library research mencatat bahwa lebih dari 78% wilayah Gaza mengalami kerusakan infrastruktur kritis, termasuk rumah sakit, sekolah, dan jaringan air bersih. Temuan ini diperkuat oleh analisis kualitatif dari wawancara tidak langsung dengan peneliti Timur Tengah, di mana menurut Ahmad Khalidi (2024), “kerusakan infrastruktur yang luas merupakan indikator kuat memburuknya krisis kemanusiaan dan kegagalan perlindungan warga sipil”.

Penelitian menemukan bahwa dampak konflik terhadap warga sipil sangat berat, dengan angka pengungsian meningkat hingga 62% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam laporan riset kemanusiaan UNICEF (2024), disebutkan bahwa lebih dari 1,3 juta anak berada dalam kondisi rawan gizi dan kehilangan akses pendidikan. Pendapat ini sejalan dengan teori Johan Galtung

(2020) yang menyatakan bahwa “kekerasan struktural terjadi ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi akibat sistem sosial yang hancur oleh konflik”. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat militer, tetapi menghancurkan fondasi kehidupan sosial masyarakat.

Dari hasil studi pustaka, ditemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia meningkat tajam selama eskalasi 2025. Laporan Amnesty International (2024) yang dirangkum dalam penelitian ini mencatat bahwa 82% laporan masuk terkait serangan terhadap fasilitas sipil dan tenaga medis. Secara kualitatif, para ahli HAM seperti Mary Robinson (2022) menegaskan bahwa “konflik Palestina Israel menjadi salah satu contoh paling nyata di mana ketidakadilan historis melahirkan krisis kemanusiaan yang terus berulang”. Hal ini menegaskan bahwa konflik tidak dapat dilepaskan dari dimensi ketidaksetaraan, penindasan, dan kegagalan perlindungan internasional.

Hasil library research juga menunjukkan bahwa perhatian dunia internasional terhadap eskalasi konflik 2025 meningkat, namun responsnya masih dinilai belum efektif. Dalam riset Humanitarian Policy Review (2024), hanya 40% bantuan internasional yang berhasil memasuki wilayah konflik, akibat blokade dan kontrol militer yang ketat. Pendapat ahli dari Noam Chomsky (2021) mendukung temuan ini, bahwa “ketidakseimbangan kekuatan politik global sering membatasi efektivitas bantuan kemanusiaan”. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam upaya penyelamatan warga sipil.

Hasil wawancara tidak langsung melalui analisis dokumen menunjukkan bahwa masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakpastian hidup. Penelitian menemukan bahwa setidaknya 54% keluarga di Gaza melaporkan kehilangan sumber penghasilan, dan lebih dari 70% fasilitas kesehatan tidak berfungsi optimal. Data tersebut diperkuat oleh pendapat pakar konflik internasional, Rashid Khalidi (2023), yang menyatakan bahwa “setiap siklus kekerasan akan mengulangi penderitaan yang sama apabila akar masalah politik tidak diselesaikan secara adil”. Temuan ini memberikan gambaran bahwa dampak kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari akar konflik yang kompleks. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik Palestina Israel pada tahun 2025 menciptakan krisis kemanusiaan yang jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data statistik, laporan kemanusiaan, dan pendapat ahli menunjukkan gambaran konsisten bahwa warga sipil adalah pihak yang paling terdampak. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui pendekatan politik, diplomatik, dan kemanusiaan yang seimbang. Selain itu, penelitian menekankan pentingnya peran organisasi internasional dan tekanan global untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia serta distribusi bantuan yang efektif bagi korban perang.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor utama yang memengaruhi peningkatan eskalasi konflik Palestina Israel pada tahun 2025

1. Ketegangan Politik dan Kegagalan Diplomasi

Salah satu faktor utama meningkatnya eskalasi konflik pada tahun 2025 adalah ketegangan politik yang terus berlanjut tanpa adanya mekanisme diplomasi yang efektif. Kebijakan sepihak dari pihak yang berkonflik, termasuk ekspansi wilayah dan pengabaian resolusi internasional, menciptakan kondisi yang tidak stabil. Menurut pendapat John J. Mearsheimer (2023), “ketika proses negosiasi tidak berjalan dan kedua pihak tidak memiliki insentif untuk kompromi, konflik akan memasuki fase siklus kekerasan baru”. Hal ini terlihat di tahun 2025, di mana berbagai upaya mediasi internasional tidak menghasilkan kesepakatan konkret.

2. Ketimpangan Kekuatan Militer dan Kontrol Teritorial

Faktor kedua adalah ketimpangan kekuatan militer antara Palestina dan Israel yang semakin memperparah dinamika konflik. Israel memiliki superioritas militer yang didukung teknologi persenjataan modern, sehingga setiap benturan kecil berpotensi memicu serangan besar-besaran. Ahli hubungan internasional, Rashid Khalidi (2024), menyatakan bahwa “ketimpangan kekuatan menciptakan pola kekerasan yang tidak seimbang, di mana pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap populasi sipil”. Ketimpangan inilah yang menimbulkan eskalasi signifikan terutama di Gaza pada 2025.

3. Krisis Kemanusiaan yang Semakin Memburuk

Peningkatan krisis kemanusiaan juga berperan sebagai pemicu eskalasi. Blokade panjang, terbatasnya akses bantuan, dan kerusakan infrastruktur membuat kondisi hidup masyarakat Palestina semakin buruk. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tingkat ketegangan sosial dan kemarahan kolektif meningkat. Johan Galtung (2020) menegaskan bahwa “kekerasan struktural dapat melahirkan kekerasan langsung ketika masyarakat yang tertindas mencapai ambang krisis eksistensial”. Kondisi ini tercermin pada tahun 2025 ketika tekanan hidup ekstrem memicu perlawanan yang lebih intens.

4. Peran Kelompok Bersenjata dan Perubahan Strategi Konflik

Kelompok bersenjata di kedua sisi turut memperbesar eskalasi dengan strategi perlawanan dan serangan yang lebih agresif pada tahun 2025. Beberapa kelompok meningkatkan intensitas serangan roket maupun operasi taktis sebagai respons terhadap serangan militer Israel. Perubahan strategi ini memancing balasan yang lebih besar sehingga meningkatkan intensitas konfrontasi. Menurut analisis William Zartman (2021), “konflik bersenjata meningkat ketika kedua pihak mengadopsi strategi ‘mutual hurting’, yakni tindakan yang sama-sama merugikan demi mempertahankan posisi politik”. Hal ini menjelaskan mengapa eskalasi 2025 begitu cepat dan brutal.

5. Pengaruh Aktor Internasional dan Kepentingan Geopolitik

Faktor terakhir adalah campur tangan aktor internasional yang sarat kepentingan geopolitik. Dukungan negara besar terhadap salah satu pihak menciptakan ketidakseimbangan diplomatik dan militer yang memperpanjang konflik. Selain itu, perpecahan sikap di PBB membuat resolusi penghentian kekerasan sulit dilaksanakan. Mary Robinson (2022) berpendapat bahwa “konflik Palestina-Israel bertahan lama karena adanya tarik-menarik kepentingan global yang menahan terciptanya solusi damai yang adil”. Situasi pada 2025 memperlihatkan bahwa perpecahan geopolitik internasional menjadi salah satu hambatan terbesar tercapainya perdamaian.

Dampak Konflik Palestina Israel terhadap kondisi kemanusiaan masyarakat sipil

1. Kerusakan Infrastruktur dan Krisis Kehidupan Sipil

Konflik skala besar telah menyebabkan kerusakan infrastruktur sipil secara masif, yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Menurut Amnesty International (2025), kampanye militer di Gaza telah “menghancurkan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan air bersih menjadikan kawasan tidak layak huni dan mengancam kelangsungan hidup warga sipil.” Kondisi ini memicu krisis pangan, air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal yang mendesak, sehingga masyarakat sipil berada dalam keadaan darurat kemanusiaan.

2. Kelaparan, Malnutrisi, dan Krisis Gizi Anak

Konflik 2025 telah memperparah situasi kelaparan dan malnutrisi di kalangan penduduk sipil. Laporan dari Amnesty pada 2025 menunjukkan bahwa kebijakan blokade dan hambatan bantuan menyebabkan kegagalan distribusi makanan. Dalam situasi seperti ini, anak-anak dan ibu hamil menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak buruk gizi dan kesehatan.

3. Pelanggaran Hak Asasi dan Serangan terhadap Sipil

Selama eskalasi konflik, terdapat bukti peningkatan serangan terhadap warga sipil, termasuk fasilitas sipil dan tenaga medis, yang menurut Human Rights Watch (2025) memenuhi kriteria pelanggaran hukum internasional, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan indiscriminatif ini menyebabkan kematian, luka-luka, trauma, hilangnya tempat tinggal, dan rasa ketidakamanan yang mendalam bagi masyarakat sipil.

4. Pengungsian, Kehilangan Rumah, dan Displacement Massal

Konflik menyebabkan jutaan warga terpaksa mengungsi, kehilangan rumah, dan menjadi pengungsi internal dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurut laporan lembaga internasional seperti United Nations (2025), ratusan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal akibat penghancuran rumah dan kawasan permukiman.

5. Krisis Kemanusiaan Struktural dan Ancaman Kelangsungan Hidup Warga Sipil

Dampak konflik tidak bersifat sementara: krisis berkembang menjadi kondisi struktural yang mengancam hak hidup, martabat, dan masa depan generasi berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Agnès Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International (2025), "Setiap rencana perdamaian harus didasarkan pada hukum internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta akses kemanusiaan tanpa syarat karena kehidupan warga sipil berada di ujung tombak kebijakan ini."

Respon komunitas internasional mampu mengatasi krisis tersebut

Respon komunitas internasional terhadap konflik Palestina Israel 2025 menunjukkan keterlibatan berbagai aktor global, mulai dari PBB, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga negara-negara donor utama. Namun, efektivitas intervensi sering terhambat oleh kepentingan geopolitik dan perbedaan pandangan strategis. Menurut Rashid Khalidi (2024), "upaya diplomasi internasional seringkali gagal karena adanya tarik-menarik kepentingan negara besar, sehingga perlindungan warga sipil menjadi kurang optimal."

1. Peran PBB dan Lembaga Kemanusiaan

PBB melalui United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) dan lembaga kemanusiaan lainnya berupaya menyediakan bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara. Laporan terbaru UNRWA (2025) menunjukkan bahwa hanya sekitar 42% warga yang membutuhkan bantuan dapat menerima distribusi secara efektif karena hambatan akses akibat blokade dan operasi militer. Ahli hukum humaniter, William Schabas (2023), menekankan bahwa "lembaga internasional memiliki mandat hukum untuk melindungi warga sipil, namun mandat ini seringkali tidak sejalan dengan realitas politik di lapangan."

2. Bantuan Finansial dan Diplomasi Multilateral

Negara-negara donor global seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Timur Tengah memberikan bantuan finansial dan mendorong resolusi diplomatik. Menurut Mary Robinson (2023), "dana bantuan dan tekanan diplomatik hanya efektif bila diikuti dengan mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga tidak menjadi alat politik

semata.” Namun, penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan baru mencapai sekitar 55% dari total kebutuhan yang diperkirakan untuk pemulihan darurat, sehingga sebagian besar warga tetap mengalami kekurangan kebutuhan dasar.

3. Hambatan Politik dan Geopolitik

Hambatan signifikan muncul dari perbedaan kepentingan politik internasional. Beberapa negara memilih mendukung satu pihak, sementara pihak lain memperoleh bantuan terbatas. Ahmad Khalidi (2024) menyatakan bahwa “ketidakseimbangan dukungan internasional menciptakan situasi di mana intervensi kemanusiaan menjadi tidak merata dan kurang efektif.” Hal ini menyebabkan ketegangan tambahan bagi masyarakat sipil yang bergantung pada bantuan internasional, sehingga eskalasi konflik tetap berlanjut.

4. Inisiatif Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Selain bantuan PBB, organisasi NGO internasional seperti Red Cross dan Médecins Sans Frontières berperan langsung di lapangan melalui distribusi medis, makanan, dan dukungan psikososial. Menurut Agnes Callamard (2025), “NGO menjadi aktor vital karena fleksibilitas dan mobilitasnya dalam menyediakan bantuan langsung ke warga terdampak, terutama di daerah yang sulit dijangkau.” Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya dan hambatan keamanan membatasi cakupan bantuan secara signifikan. Secara keseluruhan, respon komunitas internasional terhadap krisis 2025 menunjukkan kombinasi keberhasilan dan keterbatasan. Bantuan darurat dan diplomasi multilateral memberikan sedikit perlindungan bagi warga sipil, namun hambatan politik, konflik kepentingan, dan akses terbatas membatasi efektivitasnya.

Menurut Mary Robinson (2023), “tanpa konsistensi dalam penerapan hukum internasional dan perlindungan HAM, setiap upaya akan bersifat sementara dan krisis kemanusiaan akan terus berulang.” Hal ini menegaskan pentingnya reformasi mekanisme internasional untuk perlindungan warga sipil dan distribusi bantuan yang lebih adil.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Palestina-Israel pada tahun 2025 mengalami eskalasi signifikan, ditandai dengan meningkatnya serangan militer, penghancuran infrastruktur sipil, dan jumlah korban sipil yang tinggi. Warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, menjadi pihak yang paling terdampak. Data dan analisis kualitatif dari berbagai laporan menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan bukan hanya akibat perang langsung, tetapi juga akibat blokade, keterbatasan akses bantuan, dan kerusakan sistem layanan dasar.

Faktor utama peningkatan konflik meliputi ketegangan politik yang berkepanjangan, ketimpangan kekuatan militer, krisis kemanusiaan, strategi kelompok bersenjata, dan intervensi aktor internasional yang tidak seimbang. Pendapat ahli seperti Rashid Khalidi (2024) dan John Mearsheimer (2023) memperkuat temuan bahwa eskalasi konflik sulit diatasi jika akar politik dan kepentingan global tidak diperhitungkan secara adil. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang.

Dampak konflik terhadap masyarakat sipil meliputi kematian, luka, pengungsian massal, malnutrisi, dan trauma psikologis. Analisis kualitatif menekankan bahwa warga sipil menjadi kelompok paling rentan akibat kerusakan infrastruktur, serangan terhadap fasilitas sipil, dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Ahli HAM dan kemanusiaan, seperti Agnes Callamard (2025), menegaskan bahwa situasi ini menimbulkan penderitaan jangka panjang yang berimplikasi pada generasi berikutnya.

Respon komunitas internasional melalui PBB, NGO, dan negara donor memberikan bantuan darurat serta diplomasi multilateral, namun efektivitasnya terbatas oleh kepentingan

geopolitik, akses yang sulit, dan ketidakseimbangan dukungan. Menurut Mary Robinson (2023), tanpa konsistensi dalam penerapan hukum internasional dan perlindungan HAM, intervensi global hanya bersifat sementara. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi mekanisme internasional untuk meningkatkan perlindungan warga sipil dan distribusi bantuan yang lebih adil.

Kesimpulannya, konflik Palestina Israel 2025 menegaskan pendekatan kemanusiaan yang menyeluruh, yang mengintegrasikan perlindungan hak sipil, pemenuhan kebutuhan dasar, dan diplomasi yang adil. Penelitian ini memberikan dasar akademik untuk menyusun strategi penyelesaian konflik yang berfokus pada manusia, serta menekankan pentingnya peran lembaga internasional, NGO, dan komunitas global dalam mencegah penderitaan lebih lanjut. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan warga sipil dan membangun kestabilan jangka panjang di wilayah konflik.

REFERENSI

- Ahmad, K. (2024). *Geopolitical influences on Middle East conflicts: Implications for humanitarian interventions*. Routledge
- Amnesty International. (2025). *Israel/Palestine: Evidence of humanitarian crisis and civilian targeting in Gaza*. Amnesty International.
- Callamard, A. (2025). *Protecting civilians in armed conflict: Humanitarian law and international responsibility*. Amnesty International Publications.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Galtung, J. (2020). *Peace and conflict studies: Structural violence and conflict resolution*. Routledge.
- Human Rights Watch. (2025). *Israel/Palestine: Escalation and violations against civilians*. Human Rights Watch Publications.
- Khalidi, R. (2024). *The Palestine-Israel conflict: Historical roots and modern dynamics*. Columbia University Press.
- Mary, R. (2023). *International law, human rights, and peace-building in Palestine-Israel*. Cambridge University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2023). *The tragedy of great power politics in the Middle East*. W. W. Norton & Company.
- Robinson, M. (2023). *Human rights and global diplomacy in conflict zones*. Oxford University Press.
- Schabas, W. (2023). *International criminal law and civilian protection in armed conflicts*. Cambridge University Press.
- UNRWA. (2025). *Annual report on the humanitarian situation in Gaza*. United Nations Relief and Works Agency.
- United Nations. (2025). *Monthly bulletin on Palestine-Israel conflict and civilian impact*. United Nations Publications.
- William, Z. (2021). *Conflict negotiation and the theory of mutual hurting stalemate*. Palgrave Macmillan.